

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Landasan Teoritik

1. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul ulama, di singkat NU artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 januari 1926/16 rajab 1344 H di surabaya. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia islam kala itu. Pada tahun 1923.¹

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana--setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisai pendidikan dan pembebasan. Ketika Raja Ibnu Saud hendak

¹ soelaiman fadli 1:2007

menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31

Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.²

Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlul Sunnah Wal Jamaah dengan menganut salah satu dari 4 madzhab (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali).

Bahkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang pertama tahun (1927) dinyatakan bahwa organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu madzhab empat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kala itu antara lain :

- a. Memperkuat persatuan ulama yang masih setia kepada madzhab
- b. Memberikan bimbingan tentang jenis-jenis kitab yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam.
- c. Penyebaran ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan madzhab empat.
- d. Memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasi.
- e. Membantu pembangunan masjid-masjid, langgar dan pondok pesantren.
- f. Membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin.³

2. Badan Otonom

² <https://www.nu.or.id/static/6/sejarah>

³ Seolaiman Fadli 6:2007

Badan Otonom yang di singkat (BANOM) , adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

Banom mempunyai anggota, mempunyai pengurus dari pusat sampai ke daerah, mempunyai Peraturan Rumah Tangga (PRT) sendiri dan juga mempunyai sistem permusyawaratan organisasi sendiri, seperti kongres, mukernas, dan lain sebagainya.

Bagaimanapun BANOM merupakan sayap dari NU. Sebagai alat kegiatan, banom harus makmun kepada NU dan menjadikan NU sebagai imamnya. Salah satu fungsi BANOM adalah sebagai wadah pengkaderan NU di masa depan. Apabila kader mereka menjadi pejabat, politisi, pedagang, seniman, cendikiawan, polisi atau tentara, mereka harus berkepribadian NU. Sebaliknya, NU harus bergerak sesuai dengan skenario, dan NU harus menjadi sutradara yang baik.

Sesuai hasil dengan keputusan muktamar ke 31 di donohudan Solo (2004), NU memiliki 10 banom, yaitu :

- a. Jami'iyah Ahli Thoriqoh al-mu'tabarah an-Nahdliyah.
- b. Jam'iyatul Qurra Wal huffazh (JQH).
- c. Muslimat.
- d. Fatayat.
- e. Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR).
- f. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama).
- g. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).
- h. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI).
- i. IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama).

j. Pagar Nusa⁴

3. Sifat dan Definisi Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir dari masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direct action*.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacing*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya dan sebagainya.

Menurut Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi politik berpendapat dalam buku budiardjo. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara

⁴ Antologi NU Solaeman Fadeli 34:2007

langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrack, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (*the authorative allocation of values for a society*). Dalam hubungan dengan negara-negara baru Samuel p. Huntingon dan joan M. Nelson dalam *no easy choic : Political Participation in developing countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukan seecara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang berrtindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (*by political participation we mean activity by private citizens designed to influence goverment decision making. Participation may be individual or collective, organized spontaneous,sustained or sporadic,peaceful or violent, legal or ilegal, effective or ineffective*). Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*) .Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menurut diberikan

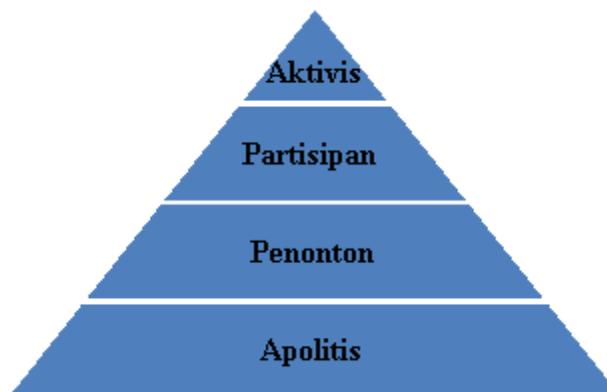
hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini di mulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka.

4. Partisipasi Politik di Negara Demokrasi

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pel-berbagai bentuk intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan. Di bawah ini di paparkan piramida pola partisipasi. Piramida partisipasi I, menurut Milbarth dan Goel (1977:82) dalam buku budiardjo (2009:372).

Gambar 2.1

Piramida Partisipasi Politik



Keterangan :

- Aktivistis : *The deviant* (termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak dan teroris) pejabat publik atau calon pejabat publik fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.
- Partisipan : Orang yang bekerja untuk kampanye; anggota partai secara aktif; partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis; orang yang terlibat dalam komunitas proyek.
- Penonton : Orang yang menghadiri reli-reli politik; anggota dalam kelompok kepentingan; pemilih; orang yang terlibat dalam diskusi politik; pemerhati dalam pembangunan politik. Apolitis : (Apoliticals)⁵

5. Partisipasi Politik di Negara Berkembang

Negara-negara berkembang yang non komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut serta masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial dan ekonomi, agama dan sebagainya. Integritas nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas kepada negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik.

Di beberapa negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. Berkaitan dengan gejala itu, jika hal itu terjadi di negara-negara maju sering kali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. Tetapi kalau hal itu terjadi di negara-negara berkembang tidak

⁵ (Miriam Budiardjo 373 :2009).

selaludemikian halnya. Di beberapa negara apatis, pemerintah menghadapi masalah bagaimana meningkatkan partisipasi itu, sebab jika partisipasi mengalami jalan buntu, dapat terjadi dua hal yaitu menimbulkan “anomi” atau justru “revolusi”. (Miriam budardjo 380-381:2009).

6. Partisipasi Masyarakat dalam Politik

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, ‘*public policy*’. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, ‘*voting*’; menghadiri rapat umum, ‘*campaign*’; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, ‘*contacting*’: dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang di maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokratis untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan itu adalah dengan melalui mekanisme pemilihan umum. Terkait dengan tugas tersebut maka menjadi tugas partai politik untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari masyarakat agar tujuan itu dapat tercapai. Cara lain dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pemilu melalui penguatan partai politiknya. Argumentasinya, bahwa partai politik

diwajibkan melakukan pendidikan politik. Bukan malahan partai politik mengarahkan pemilih dengan metode politik instan, yaitu pemberian uang. Ketika pola atau cara ini masih direproduksi terus menerus, bisa dipastikan nilai dan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi menjadi mengecil hanya dihargai dengan uang. Bukan karena kesadaran sendiri untuk memilih partai karena kinerja serta keberpihakannya dalam momentum pemilu. Seseorang mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik Menurut Davis terdapat tiga unsur, yaitu:

- a. Adanya penyertaan pikiran dan perasaan.
- b. Adanya motivasi untuk berkontribusi.
- c. Adanya tanggung jawab bersama.

Partisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atau Negara tetapi kalau kemauan ataupun kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan terwujud. Di samping itu, ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana dikemukakan Sulaiman, bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- 2) Partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana.
- 3) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 4) Partisipasi dalam bentuk dukungan.

Adapun jenis partisipasi politik menurut Sulaiman yaitu sebagai berikut :

- a) Partisipasi pikiran "*Psychological Participation*".
- b) Partisipasi tenaga "*Physical Participation*".
- c) Partisipasi pikiran dan tenaga "*Psychological and Physical Participation*".

- d) Partisipasi keahlian "*Participation With Skill*".
- e) Partisipasi barang "*Material Participation*".
- f) Partisipasi uang/dana "*Money Participation*".

Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan factor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi. Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Implementasi partisipasi masyarakat seharusnya anggota masyarakat merasa tidak lagi menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. (Ramlan Surbakti 131-133:1992).

7. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

Analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara setiap perhelatan demokrasi atau pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi semakin

tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis, tetapi dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan masyarakat yang feodal atau tidak demokratis maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya. Cara partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai cara partisipasi politik dimana

warga Negara melakukan berbagai usaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Ada 3 jenis cara partisipasi yaitu :

- a. *Interst Articulation*, partisipasi jenis ini artinya individu menyuarakan kepentingan melalui hubungan personal, organisasi formal atau informal serta berbagai macam proses.
- b. *Interest Aggregation*, partisipasi politik jenis ini artinya seorang individu menyatukan aspirasi yang banyak beraneka ragam.
- c. *Policy Making*, partisipasi politik jenis ini artinya seseorang individu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Masyarakat yang bijak harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin. Dengan demikian, secara tidak langsung akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pilih dalam pemilu kita jangan sampai menyia-nyiakkan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Ketidaksiertaan kita sebenarnya justru akan membuat kita susah sendiri karena kita tidak turut memilih tetapi harus mengikuti pemimpin yang tidak kita pilih. Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi pemilih, pemilu hanyalah menjadikan sebagai objek

semata dan salah satu kritiknya adalah ketika masyarakat tidak merasa memiliki dan acuh tak acuh terhadap pemilihan umum.⁶

8. Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau yang dipercayai, Orang atau atau partai yang di percayai, kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat diciptakan pemerintahan yang representatif (*representative government*) (Surbakti 1992:181).

Pemilu dapat diberikan makna atau penafsiran yang bermacam-macam tergantung dari perspektif yang digunakan, misalnya dari perspektif tujuan, tingkat perkembangan suatu negara, dan jenis demokrasi yang dianut. Dari perspektif tujuan, maka pemilu dapat diberikan makna sebagai pemindahan konflik dari masyarakat kepada perwakilan politik agar supaya integritasi masyarakat tetap terjamin. Dari perspektif perkembangan suatu negara, di negara berkembang pemilu dapat di berikan makna sebagai alat membenarkan rezim yang berkuasa. Sehingga tidak dapat mengherankan untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tidak segan-segan memobilisasi masa para pemilih, bahkan juga melakukan intimidasi dan paksaan fisik.⁷

9. Pemilu dan Demokrasi

Di kebanyakan negara demokrasi dunia barat, pemilu di anggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap dengan

⁶ https://www.academia.edu/24776096/Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_Umum

⁷ Cholisin dan Naiwan 2012:126-127

cukup akurat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian disadari bahwa PEMILU tidak merupakan satu-satunya tolak ukur (Budiardjo 1992:4) dalam buku dasar-dasar ilmu politik (Cholisin 2012:134). Pemilu merupakan salah satu lembaga politik di butuhkan oleh demokrasi skala besar :

- a. Para pejabat yang dipilih.
- b. Pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala.
- c. Kebebasan berpendapat.
- d. Akses ke sumber-sumber informasi alternatif.
- e. Otonomi asosiasi.
- f. Hak kewarganegaraan yang inklusif (mencakup semuanya).⁸

10. Rekrutmen Politik melalui Pemilihan Umum

Rekrutmen politik melalui pemilihan umum atau pemilu sudah lazim dilaksanakan di hampir semua negara, khususnya negara-negara demokratis. Hanya saja, yang membedakan satu sama lain terletak pada mekanisme dan masa jabatan. Salah satu kemungkinan ketika individu dalam masyarakat aktif berpartisipasi politik adalah menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan, baik jabatan administrasi maupun jabatan politik. Jabatan-jabatan tersebut dapat berada dalam tingkatan yang paling rendah seperti staf perkantoran pemerintah sampai pada tingkatan lembaga paling tinggi seperti jabatan menteri ataupun jabatab presiden di lembaga politik eksekutif dan jabatan anggota ataupun ketua Dewan Perwakilan Rakyat di lembaga politik legislatif. Proses politik yang biasanya mengantarkan untuk menuju jabatan-jabatan tersebut adalah rekrutmen politik (*political recruitment*). Menurut Rush dan Althof (2003) dalam buku sosiologi politik (Said Gatara,Dzulkiah 2007:115) mendefinisikan rekrutment politik sebagai proses yang individu-individunya menjamin atau mendaftarkan diri

⁸ Robert Dahl (1994) dalam buku on Democracy, dalam buku dasar-dasar ilmu politik (Cholisin 2012:134).

untuk menduduki suatu jabatan. Lebih lanjut, Rusah dan Althof mengatakan bahwa rekrutmen atau perekrutan ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak normal. Dikatakan proses dua arah, dikarenakan individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin didekati oleh orang lain kemudian menjabat posisi-posisi tertentu. Dengan cara yang sama, perekrutan ini bisa disebut formal kalau para individu di rekrut secara terbuka melalui cara prosedural atau institusional berupa seleksi atau pemilihan. Kemudian, disebut sebagai informal manakala para individunya direkrut secara *prive* (sendirian) atau “dibawah tangan” tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional.⁹

Secara sederhana, Miriam Budiardjo (2004) :164) rekrutmen politik sebagai seleksi kepemimpinan (*selection leadership*) mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Dalam hal lembaga kegiatan politik, rekrutmen politik merupakan fungsi dari partai, yakni rangkaian perluasan lingkup partisipasi politik. Di antara caranya adalah melalui pribadi, persuasi dan lain-lain. Pada umumnya, sejumlah sistem politik berusaha memisahkan antara jabatan politik dan jabatan birokratis dengan melembagakan satu doktrin netralitas politik bagi para individu administrator. Di Indonesia, misalnya, Pegawai-pegawai sipil direkrut oleh badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui lembaga birokrasi yang tersebar di departemen-departemen dan pemerintah daerah. Praktik netralitas para pejabat pegawai sipil misalnya juga dipraktikkan di Inggris. Disana, pegawai-pegawai sipil direkrut melalui badan organisasi politik yang netral: dan sekali diangkat diharapkan akan mempertahankan kenetralan politiknya. Jadi, pemerintahan bisa gonta-ganti partai

⁹ Said Gatara, Dzulkiah 2007:115

politiknnya bagaimana pemegang kekuasaan, akan tetapi para pegawai sipil tetap berada pada posnya¹⁰ dalam buku sosiologi politik said gatara dan moh dzulkiah.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta spirasi masyarakat. Sekalipun demikian disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya. Di banyak negara dunia ketiga beberapa kebebasan seperti yang di kenal di dunia barat kurang di indahkan atau sekurang-kurangnya diberi penafsiran yang berbeda. Dalam situasi semacam ini, setiap analisis mengenai hasil pemilihan umum harus memperhitungkan hasil ketidak bebasan itu serta kemungkinan adanya faktor mobilisasi yang sedikit banyaknya mengandung unsur paksaan. (Budiardjo : 461).

B. Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil referensi penelitian terdahulu yang di lakukan Edi Kusmayadi (2016) yang melakukan penelitian mengenai pergeseran sikap politik Massa NU PPP dan PKB. Penelitian tersebut terfokus pada sikap politik massa NU pada masa PILEG 2014 di kota Tasikmalaya. Selanjutnya penelitian terdahulu Akhmad Satori dan Mohammad Ali Andrias, dengan judul “Pergeseran Perilaku Politik Islam Tradisional Pasca Pemilu Legislatif pada tahun 2009 di Kota Tasikmalaya”. Menyimpulkan bahwa terdapat pergeseran perilaku pemilih di kalangan islam tradisional Kota Tasikmalaya, hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor antara lain: semakin rasionalnya warga NU dalam partisipasi politik untuk memilih.

¹⁰ Rush dan Akthof : 2003

Selanjutnya penelitian terdahulu oleh Munawir Haris (2015) penelitian ini berjudul Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat menggunakan metode penelitian kualitatif

Gerakan politik NU sebagai sebuah organisasi keagamaan dan Muslimat NU sebagai badan otonom nampak dalam lintasan sejarah bangsa. Problem yang muncul adalah sejauh mana partisipasi NU dalam politik nasional dan seberapa besar keterwakilan muslimat NU dalam politik. Melalui pendekatan tipologi, Tulisan ini akan mengeksplorasi kontribusi politik NU dan Muslimat NU dalam lintasan sejarah bangsa. Beragam data menunjukkan bahwa NU dan muslimat NU berpartisipasi pasif dan aktif dalam politik nasional. Pada masa kolonial NU masuk dalam tipologi partisipan pasif, namun dalam masa berikutnya mengambil bentuk partisipan aktif yang non-konvensional. Partisipan aktif ini nampak jelas ketika NU mengeluarkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Partisipasi ini kemudian disalurkan melalui Masyumi, lalu mendirikan parpol secara mandiri. Partisipasi pasif Muslimat NU mulai diakui pada tahun 1938, dan baru diakui sebagai partisipan aktif pada tahun 1946. Muslimat menjadi partisipan aktif yang memperjuangkan kesetaraan gender pada tahun 1954. Lima tahun kemudian Muslimat menjadi galdiator participant, dan mulai menunjukkan peran gendernya secara simultan dengan mengangkat isu-isu strategis yang bertujuan untuk penguatan hak, sumber daya dan aspirasi bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik termasuk politik praktis

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Hasil Penelitian | Metode |
|----|--|--|---|
| 1. | Edy Kusmayadi (2016) Topik : Pegeseran Sikap Politik Massa NU PPP dan PKB (analisa pada Pemilu Legislatif di Kota Tasikmalaya 2014) | Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pergeseran sikap politik masa NU partai PKB dan Partai PPP pada pemilu legislatif 2014 di sebabkan oleh sikap massa NU yang tinggal di pinggiran kota, memiliki sikap politik pada pemilu legislatif 2014 begantung pada pengurus NU wilayah setempat. Kelompok masa NU PPP bersikap pragmatis, kelompok ini tersebar di berbagai tempat dapil 1 sampai dengan dapil IV. | Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif |
| 2. | Akhmad Satori dan Mohammad Ali Andrias (2013) Topik : pergeseran perilaku politik islam tradisional pasca pemilu legislatif pada tahun 2009 di Kota Tasikmalaya | Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pergeseran perilaku pemilih di kalangan islam tradisional di tasikmalaya. Semakin rasionalnya warga NU dalam partisipasi politik untuk memilih.sebagian warga NU cenderung pragmatis atau moderat dalam masalah politik. | Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 3. | <p>Munawir haris (2015) Topik : PARTISIPASI POLITIK NU DAN KADER MUSLIMAT DALAM LINTAS SEJARAH</p> | <p>Muslimat menjadi partisipan aktif yang memperjuangkan kesetaraan gender pada tahun 1954. Lima tahun kemudian Muslimat menjadi galdiator participant, dan mulai menunjukkan peran gendernya secara simultan dengan mengangkat isu-isu strategis yang bertujuan untuk penguatan hak, sumber daya dan aspirasi bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik termasuk politik praktis</p> | <p>Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif</p> |
|----|---|---|--|

C. Kerangka Pemikiran

